BAB IV

PENUTUPAN

4.1 Kesimpulan

Uni Eropa merupakan sebuah struktur identitas kolektif yang mengikat negara negara anggota dikawasan Eropa. Berdirinya Uni Eropa seperti sebuah negara federal, kedaulatan negara nggota diserahkan sebagian kepada organisasi tersebut. Identitas kolektif Uni Eropa mencakup sistem politik, ekonomi, hukum dan sosial. Integrasi yang dilakukan di benua Eropa menciptakan peradaban tunggal yang berdiri diatas negara. Faktor yang mendorong terjadinya identitas kolektif Uni Eropa itu sendiri adalah trauma akan perang sebelumnya yang membawa kerugian besar di dataran tersebut. Ketakutan akan terjadinya perang membentuk sistem ketergantungan antar negara di Eropa sehingga menjalankan kerja sama ekonomi untuk menguntungkan satu sama lain. Sistem ketergantungan antar negara dan ketakutan bersama akan terjadinya konflik dan perang membuat negara negara di Eropa melakukan *konvergensi* (penyatuan) ide atau gagasan sehingga membentuk sebuah organisasi yang mengatur interaksi antar negara di kawasan tersebut. Pada perkembanganya organisasi yang pada awalnya mencakup hanya ekonomi menjadi Uni Eropa yang mencakup hampir semua urusan dalam interaksi internasional.

Jerman menjadi salah satu pendiri Uni Eropa dan merupakan negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di Uni Eropa. Jerman menjadi negara yang sangat penting

bagi Uni Eropa dan mampu mempengaruhi negara negara anggota lain dalam mengambil keputusan. Identitas Jerman terbentuk bersama dengan berdirinya Uni Eropa. Identitas Jerman sendiri merupakan demokrasi liberal sesuai dengan nilai nilai Uni Eropa, selain itu terdapat leitkultur Jerman yang merupakan pedoman berfikir bagi para imigran dalam mengintegrasikan diri di Jerman atau Eropa. leitkultur Jerman menuntut imigran untuk mengikuti nilai nilai Uni Eropa dan menerapkan budaya dominan Jerman atau Eropa yang terbentuk dari sejarah peradaban dengan pengaruh agama kristen-yahudi. Dalam kasus penolakan Jerman terhadap keanggotaan Turki di Uni Eropa, Jerman mendefinisikan dirinya sebagai "kami" dalam konteks identitas kolektif Uni Eropa. Dengan mendefinisikan diri seperti itu, Jerman menganggap Turki sebagai rival dalam budaya Lockean.

Sistem lockean merupakan kondisi hubungan antar negara yang memandang satu sama lain sebagai saingan (*rival*). Proses transformasi dari lockean menjadi kantian dapat dilakukan dengan "Master Variable" yang didalamnya terdapat dua jenis variabel dalam membentuk identitas kolektif. Pertama, variabel *Self Restraint* yang menjadi variabel dasar yaitu negara harus mampu menahan diri dalam bertindak. Kedua, adalah tiga variabel efisien, yaitu: 1) *Interdependence*, merupakan ketergantungan yang merekatkan hubungan negara negara dalam kerja sama sehingga membentuk intersubjektivitas untuk saling menguntungkan, 2) *Common fate*, merupakan nasib atau ancaman yang dialami bersama, 3) *homogeinity*, yaitu kesamaan identitas yang mendorong negara satu sama lain untuk saling memahami dan menerima agar negara memandang negara lain sebagai satu kelompok yang

sama. Untuk mencapai intersubjektivitas dalam budaya kantian, cukup dengan salah satu dari tiga variabel efisien yang digabungkan dengan *self restraint*. Identitas Kolektif memiliki makna yang lebih dalam dari sekedar kerja sama sehingga untuk membentuk identitas kolektif atau bergabung dengan identitas kolektif yang ada harus memenuhi keseluruhan dari "*master variable"*.

Uni Eropa dapat menerima anggota baru dengan prosedur yang menuntut calon anggota memenuhi *Compenhagen criteria*, dan *Acquis criteria*. Kriteria Kopenhagen menuntut stabilitas negara dalam menjalankan demokrasi, penegakan HAM, perlindungan minoritas, supremasi Hukum, dan Ekonomi. *Acquis criteria* merupakan proses penerapan aturan di negara calon anggota melalui negosiasi dari 35 bab yang mencakup berbagai bidang untuk memastikan calon anggota menerapkan aturan Uni Eropa. Kedua kriteria tersebut merupakan bentuk dari *self-restraint* sebagai konstitusi yang mengendalikan calon anggota sebelum bergabung dengan Uni Eropa.

Jerman memandang Turki belum mampu memenuhi *Compenhagen criteria* karena demokrasi Turki menurun akibat kebijakan domestik pasca gagalnya kudeta dan referendum konstitusi Turki membuat kekuasaan eksekutif terlalu besar. HAM dan perlindungan minoritas di Turki semakin buruk dengan adanya penangkapan aktivis HAM dan kekerasan terhadap terduga pelaku kudeta. Selain itu perlakuan pemerintah terhadap etnis minoritas suku Kurdi juga melanggar prinsip Uni Eropa. Supremasi hukum di Turki semakin jauh dari prinsip prinsip Uni Eropa dalam

menangani pelaku kudeta dan Rencana pemberlakuan hukuman mati bagi terduga pelaku kudeta. Ekonomi Turki telah mencapai prestasi cukup baik namun dikhawatirkan stabilitasnya karena kondisi politik domestik di Turki.

Dalam melakukan negosiasi sebagai proses penerapan *Acquis criteria,* Jerman bersama negara nggota lain menghentikan sementara negosiasi yang dilakukan sampai stabilitas politik di Turki membaik. Selain itu saat negosiasi berlangsung Jerman sempat menghentikan negosiasi di bab 22 untuk sementara karena demonstrasi di Gezi Park dan dibuka kembali tahun 2013 setelah kondisi Turki membaik. Ditengah negosiasi. Pada bab 24 terdapat pembahasan terkait bebas visa yang memerlukan 72 syarat dan Turki telah dijanjikan untuk dapat akses tersebut sebagai imbalan karena menangani masalah imigran yang menjadi krisis Uni Eropa. Namun Turki tidak mampu memenuhi 72 syarat untuk bebas visa. Dapat disimpulkan bahwa Turki tidak mampu mengendalikan diri dari konstitusi yang telah terbentuk di Uni Eropa sebagai *self-restraint* anggota Uni Eropa. Hal ini sudah menjawab alasan Jerman menolak Turki dengan perspektif konstruktivisme Wendt bahwa *self-restraint* merupakan variabel penting dalam melakukan integrasi membentuk identitas kolektif.

Konflik yang terjadi antara Jerman dan Turki mulai memanas sejak Turki menjadi calon anggota Uni Eropa dan sejak arah kebijakan politik Turki berubah pasca gagalnya kudeta. Selain dari konflik yang terjadi, Jerman memandang Turki sebagai rival karena tiga variabel efisien dari “master variabel” untuk bergabung dalam identitas kolektif belum seluruhnya dipenuhi oleh Turki. Pertama:

interdependence, Ketergantungan Jerman dan Turki dalam bidang ekonomi sebagai pasar dan salah satu sumber SDM bagi perusahaan Jerman serta Penyelesaian masalah imigran Eropa bergantung kepada kerja sama dan stabilitas Turki. disisi lain Turki bergantung dalam memajukan ekonomi dan politiknya dengan Jerman dan Uni Eropa. Turki cukup memenuhi variabel ketergantungan ini yang membuat pencalonanya masih mendapat kesempatan dari Uni Eropa. kedua: *Common fate*, Jerman dan Turki memiliki nasib yang sama sebagai negara yang kalah dalam perang dunia namun nasib bersama dalam memandang ancaman antara Jerman dan Turki berbeda, yaitu Paham euroskeptisme, xenophobia dan islamophobia yang menganggap Imigran muslim dari Timur Tengah menjadi ancaman bagi stabilitas Eropa. Ancaman tersebut tidak dirasakan oleh Turki bahkan islamophobia dan xenophobia yang dirasakan masyarakat Eropa adalah identitas yang melekat di Turki, selain itu Euroskeptis di Turki juga meningkat. Ketiga: *Homogeinity*, Jerman dan Turki memiliki identitas yang berbeda dimana Jerman memiliki Leitkultur sebagai pedoman berfikir dalam memahami identitas Jerman yang didalamnya terdapat definisi budaya dari peradaban Eropa dan agama kristen-yahudi. Sedangkan Turki mempertahankan Habitus nasionalnya dalam menjalankan politik luar negerinya yaitu budaya nasional dan islam konservatif yang terbangun di masyarakat Turki melalui peradaban nasional yang berasal dari peradaban Timur dan Islam.

Jerman menganggap Turki sebagai rival karena dari keseluruhan “master variable” hanya satu variabel yang dapat dipenuhi oleh Turki yaitu *interdependence* yang merupakan variabel efisien, dimana ketergantungan saja tidak cukup untuk

transformasi intersubjektivitas negara dari lockean ke kantian. sedangkan Wendt menjelaskan untuk membentuk atau bergabung dalam identitas kolektif maka harus memenuhi seluruh variabel. Merujuk dari teori konstruktivisme Alexander Wendt, Jerman menolak Turki menjadi anggota Uni Eropa karena Jerman mendefinisikan dirinya sebagai "kami" dalam identitas kolektif Uni Eropa sehingga masih menganggap Turki sebagai rival.

Intersubjektivitas dalam budaya kantian dapat dijalankan dengan salah satu dari 3 variabel efisien dan self-restraint. Jerman dan Uni Eropa dengan Turki memiliki ketergantungan dalam bidang ekonomi dan keamanan. Kemudian sebagai calon anggota. Turki harus memenuhi kriteria Uni Eropa, yaitu copenhagen criteria dan Acquis criteria yang menjadi self-restraint bagi calon anggota. Bentuk self restraint itu sendiri dapat berupa perjanjian atau kesepakatan yang membatasi negara atau aktor dalam intersubjektivitasnya. Jika Turki tidak menjadi calon anggota Uni Eropa, alam kerja sama yang dilakukan Turki dan Jerman atau Uni eropa akan dibentuk suatu kesepakatan baru yang menjadi self-restraint untuk Turki. hal ini menyimpulkan bahwa Jerman memandang Turki sebagai rival disebabkan oleh pencalonan Turki menjadi anggota Uni Eropa.

Turki dapat menjalin kerja sama dengan Jerman dan Uni Eropa karena ketergantungan yang ada dan dapat membentuk kesepakatan untuk mengendalikan aktor dalam intersubjektivitas kedua pihak, hal ini merupakan budaya kantian namun bukan budaya kantian di level identitas kolektif. Jerman sendiri sudah melihat bahwa Turki dapat mejalin hubungan dalam budaya kantian bersama Jerman dan Uni Eropa,

oleh karenanya Jerman memperkenalkan konsep "*privileged partnership*" yaitu posisi Turki sebagai kemitraan istimewa bagi Uni Eropa untuk memenuhi kepentingan dari kedua belah pihak. Hal itu dikarenakan Turki tidak mungkin diintegrasikan kedalam Uni Eropa dan penolakan tanpa solusi akan menyebabkan konflik besar yang akan mengancam stabilitas Uni Eropa mengingat Turki berada di perabtasan Eropa dan Asia.

4.2 Saran dan Rekomendasi

Penelitian selanjutnya akan lebih menarik jika memandang masa depan dari proses aksesi Turki ke Uni Eropa. Kemungkinan Turki untuk masuk Uni Eropa sangatlah kecil, penelitian selanjutnya dapat melihat dampak dari keputusan Jerman ataupun Uni Eropa dalam menanggapi proses aksesi Turki ke Uni Eropa. Bagaimana masa depan dari hubungan Turki dan Uni eropa jika Turki secara resmi di tolak menjadi anggota Uni eropa dan bagaimana jika Turki menjadi anggota penuh di Uni eropa. konflik identitas Turki di Uni Eropa mungkin akan membuat gerakan populis semakin meningkat atau justru mempertegas nilai demokrasi Uni eropa karena menerima perbedaan budaya dalam blok tersebut. bagaimana jika Turki secara resmi ditolak oleh Uni Eropa menjadi angggota, mengingat posisi georafis Turki diperbatasan Eropa dan Asia sangat dibutuhkan oleh Uni Eropa dalam mengatasi masalah perbatasan, dab hubungan diplomasinya ke negara negara Timur Tengah. Konsisi Turki tidak dapat dipandang remeh oleh Uni Eropa baik geografis maupun identitas keduanya sama sama bisa menyebabkan kerja sama yang lebih maju atau menyebabkan konflik yang lebiih tinggi.